

Penilaian peluang investasi pada pelelangan jalan tol Cinere-Jagorawi

Gurning, Berman Asbudin, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=116242&lokasi=lokal>

Abstrak

In frastruktur fisik, terutama jaringan jalan, sebagai pembentuk struktur ruang nasional memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun sosial budaya kehidupan masyarakat. Dalam konteks ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan tempat bertumpu perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sulit dicapai tanpa ketersediaan memadai.

Setelah pembaharuan mengenai peraturan mengenai jalan tol, dengan digantikannya UU No. 13 Tahun 1980 dengan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam UU Jalan yang baru diatur pembagian kewenangan penyelenggaraan jalan yang tegas memenuhi tuntutan otonomi; penyelenggaraan jalan tol yang tidak monopolistik; peran masyarakat yang lebih nyata dalam penyelenggaraan jalan. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 mengenai jalan tol, serta dibentuknya Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 295/PRT/M/2005 tanggal 28 Juni 2005, merupakan dorongan terwujudnya percepatan penyelenggaraan jalan tol dengan melibatkan partisipasi aktif Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.

Di Indonesia saat ini terdapat 500 km jalan tol yang dioperasikan oleh PT. Jasa Marga serta sekitar 100 km yang dioperasikan oleh pihak swasta. Secara total, jumlah jalan tol di Indonesia masih jauh dibanding Malaysia, Korea atau Jepang. Sesuai dengan rencana pemerintah untuk membangun jalan tol sepanjang 1,600 km mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2209 membutuhkan dana sekitar 153 triliun rupiah serta sekitar 95 triliun diharapkan merupakan investasi dari pihak swasta.....Physical infrastructure, especially the road network, as the shaper of the national spatial structure has a very strong relationship with the economic growth of a region as well as the socio-cultural life of the community. In the economic context, roads as social capital for the community are a place to rely on economic development, high economic growth is difficult to achieve without adequate availability.

After the renewal of regulations regarding toll roads, with the replacement of Law no. 13 of 1980 with Law no. 38 of 2004 concerning Roads. The new Road Law regulates the division of authority for road administration that strictly fulfills the demands of autonomy; non-monopolistic toll road operation; a more tangible role of the community in road management. This is reinforced by Government Regulation Number 15 of 2005 concerning toll roads, as well as the establishment of the Toll Road Management Agency (BPJT) through the Decree of the Minister of Public Works of the Republic of Indonesia Number 295/PRT/M/2005 dated June 28, 2005, which is the impetus for the realization of the acceleration of toll road operations. by involving the active participation of the Regional Government and Business Entities.

In Indonesia, there are currently 500 km of toll roads operated by PT. Jasa Marga and about 100 km operated by private parties. In total, the number of toll roads in Indonesia is still far from Malaysia, Korea or

Japan. In accordance with the government's plan to build a 1,600 km toll road from 2005 to 2209, it requires funds of around 153 trillion rupiah and around 95 trillion is expected to be an investment from the private sector.